



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMAD FAHIM
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 719664

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	470.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	171.100.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000		
2. MOBIL, SUZUKI S CROSS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.200.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.070.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	679.170.000
III. HUTANG	Rp.	181.067.580
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	498.102.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINARTI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 1000202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	398.067.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 51.552.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 51.015.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 150.500.000		
5. Tanah Seluas 1.370 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	130.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.637.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	24.028.410
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	601.732.910



III. HUTANG

Rp. 161.424.360

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 440.308.550

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROCHMATUN NAIM**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **719447**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	660.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/145 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	83.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA CALYA 1.2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.173.299
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	762.473.299
III. HUTANG	Rp.	69.249.987
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	693.223.312

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.